

**PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROGRAM KERJA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

BUDI SANTOSO

NPM. 1421020167

Program Studi : Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. ALAMSYAH, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : ROHMAT, S.Ag., M.HI.



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2018 M

ABSTRAK
PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROGRAM KERJA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN

Oleh

Budi Santoso
1421020167

Kemiskinan tidak hanya terjadi di desa saja namun juga sebagian terjadi di perkotaan. Tingkat kemiskinan di kota dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat kualitas hidup masyarakat dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam hal ini dari segi pembangunan sumber daya manusia masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota Bandar Lampung. Untuk memahami hal tersebut maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja program-program pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan di suatu negara untuk bisa mencukupi kebutuhan demi mensejahterakan rakyat. Jika pemerintah kurang teliti terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi salah satu factor kemiskinan, pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan dinegaranya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana program kerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan? Bagaimana penanganan kemiskinan dalam UU di Indonesia?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui program-program pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan.

Penelitian ini di golongan kedalam penelitian lapangan (*field research*), dimana data primer dan sekunder di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Bapedda kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 4 orang dan 6 dari masyarakat.

Hasil penelitian ini yaitu pemerintah kota ikut mendukung dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan dalam komitmen tersebut tlah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung, dalam upaya sebuah upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan, dan memberikan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk menerima bantuan sebagai orang miskin

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa : 58)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 128

PERSEMBAHAN

Dengan segala Kebahagiaan, kaya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung terselesaikanya karya ini, diantaranya :

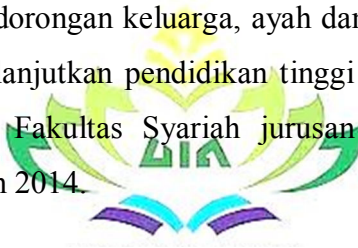
1. Ayahanda Bawon Marzuki dan Ibunda Satiyem yang telah banyak berjuang dan mendo'akan untuk keberhasilanku, terimakasih untuk untaian do'a yang mengiringi setiap langkahku, ku sadari pengorbanan kalian tidak akan terbalas, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untukku serta menuntunku dalam menentukan jalan hidupku yang Insha Allah selalu diridhoi-Nya, yang bersusah payah bekerja tanpa mengeluh demi masa depan ku.
2. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak
3. Sahabat-sahabat yang telah mensupport (Angga Noer Saputra, Afiful Ichwan, Imam Hanafi, Afrizal Zulkarnaen, Danu Anuari, Bripda Aprian Kartika Chandra, Faqih Bahtia S, Pratu Mar M. Ilham Khomeni, Prada Mar Sigit Susanto)
4. Dan sahabat-sahabat Bitjie'S Ariazzuri, Ridho, Andre, Alhabarkah aziz, febrian risa rahmanda dan Rahmad yang telah mendukung juga
5. Jurusan Hukum Tata Negara khususnya Siyasah (D) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu untuk bisa menyusul mendapatkan gelar SH semoga selalu dilancarkan segala urusannya

RIWAYAT HIDUP

Budi Santoso, dilahirkan di Tanjung Bintang, pada tanggal 15 November 1996. Anak ke satu dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Bawon Marzuki dan Ibu Satiyem .Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan :

1. SD 1 Harapan Jaya Korpri Jaya Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat yang Allah Swt berikan, serta berkat dorongan keluarga, ayah dan ibu tercinta, penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara) pada tahun 2014.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Penguasa semesta alam, penentu setiap kehidupan yang ada dimuka bumi ini yang telah memberikan kekuatan kesehatan jasad dan kelembutan ruh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROGRAM KERJA PEMERINTAH KOTA BADNAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KEMISKINAN"

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, ahlul bait beserta para sahabat dan pengikutnya yang ta'at pada ajaran islam yang sungguh sempurna.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan para pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih secara moril maupun materil kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Frengki M.Si Selaku Seketaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah.
5. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. dan Rohmat, S.Ag., M.Hi. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari'ah dan institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Khususnya Jurusan Syariah yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan yakin usaha sampai semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 13 Maret 2019

Penulis,



BUDI SANTOSO
NPM. 1421020167

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Fiqih Siyasah, Prinsip dan Bidang-bidangnya	16
B. Tugas Pemerintah Dalam Fiqih Siyasah	29
C. Peningkatan Kemakmuran Dalam Sejarah Islam	33
1. Masa Nabi Dan Sahabat	33
2. Masa Umayyah Dan Abbasiyah	39
3. Masa Modern.....	41
D. Pengentasan Kemiskinan Dalam Pandangan Islam	44
E. Pengentasan Kemiskinan Dalam UU Di Indonesia	48
BAB III PENYAJIAN DATA.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Kota Bandar Lampung.....	51
1. Sejarah singkat Kota Bandar Lampung	51
2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung Dan Penduduk.....	53
3. Struktur Pemerintah Kota Dan Tugas Fungsinya.....	54

B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan	58
1 Pendidikan.....	58
2 Pekerjaan.....	60
3 Perumahan.....	61
4 Kesehatan.....	62
BAB IV ANALISIS	66
A. Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan.....	66
B. Penanganan Kemiskinan Dalam Pandangan UU Di Indonesia.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari dari kekeliruan bagi pembaca dalam judul skripsi ini, maka perlu ada penegasan judul karena pemahaman yang salah maka akan salah pula pemahaman terhadap isinya. Oleh karena itu adanya pembahasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini, maka akan diuraikan secara terinci yang terdapat pada judul skripsi ini “PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROGRAM KERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KEMISKINAN”. Maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini antara lain:

Program kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan mengenai asas-asas dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan²

Pemerintah adalah system menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.³

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.⁴

Fiqh Siyash adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususn

² M. Andre Martin dan F. V. Bhaskarr, *Kamus Bahasa Indonesia Milienium*, (Surabaya: Karina, 2002), h. 445.

³ Aditya A. Pratama *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 311.

⁴ Lincoln Arsyat, *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 255.

ya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bagaimana program kerja pemerintah dalam menangani kemiskinan dalam pandangan fiqh siyasah

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan Dalam Pandangan Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif.

Permasalahan kemiskinan selalu menjadi topik yang untuk dibahas untuk itu, peneliti mengambil studi dipemerintah Bapedda kota Bandar lampung dan juga masyarakat kota Bandar lampung untuk mendapatkan sumber-sumber data yang akurat untuk mendapatkan permasalahan kemiskinan di kota Bandar lampung. Di perkotaan naiknya garis kemiskinan bisa diukur dari melambungnya harga harga barang baik makanan maupun bukan makanan inilah yang kemudian berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat, ada dua sumber utama penyebab naiknya kemiskinan yakni naiknya standar garis kemiskinan dan biaya-biaya kehidupan menaik.

Kondisi ini diperparah dengan naiknya angka kemiskinan bukan makanan bersamaan kebutuhan ini meliputi seperti perumahan, bahan bakar(BBM), listrik, pendidikan, dan pembatas tenaga kerja. Peningkatan nilai garis kemiskinan inilah yang kemudian menggerek naiknya jumlah orang miskin khususnya diwilayah perkotaan.

2. Secara Subyektif.

- a. Pokok bahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini
- b. Data di lapangan dalam penyusunan skripsi ini di mudahkan dengan adanya memperoleh informasi yang mendalami dan mengindetifikasi,

⁵A.Dijazuli, *fiqh siyasah*,(Jakarta: Prenada Media, 2000), h.42.

mencermati pengetahuan yang ada sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan namun juga sebagian besar terjadi di kota. Menurut Emil Salim⁶, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat.⁷ Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat kurang mampu. Begitu juga dengan Islam telah banyak mengurai solusi untuk memecahkan masalah kemiskinan yang melanda umat Islam, Islam mengajarkan, sesungguhnya seorang imam (pemimpin) di proyeksikan untuk mengambil alih peran nubuwwah (kenabian) dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' ulama.

Pengangkatan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab orang yang berakal akan tunduk kepada imamnya yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, pemerintah dalam penanganan kemiskinan hukumnya wajib serta Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa.

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan


⁶ Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 344

⁷ Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007), h. 24.

mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa'/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء: ٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa/4: 58)*⁸



Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki *skill* atau keterampilan sesuai kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah.

Namun dengan data pemerintah masih banyak penduduk kemiskinan yang belum terdaftar sebagai penerima Program-Program pemerintah kota, oleh karena itu kebutuhan manusia yang bermacam-macam adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang ketiadaan akses terhadap kebutuhan

⁸Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV.Mahkota, Edisi Revisi, 1996), h. 87.

hidup dasar lainya seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, dan kesenjangan sosial, ketiadaan jaminan masa depan. hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk kurang mampu hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas.

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidak mampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran, pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan disuatu negara untuk bisa mencukupi kebutuhan demi mensejahterakan rakyat.

Di kota Bandar lampung persoalan yang tidak mampu dicoba untuk dipecahkan melalui pengembangan sector ekonomi kerakyatan, pengembangan sector ekonomi kerakyatan merupakan pelaksanaan misi meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah dalam rangka memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai sasaran tersebut jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mensejahterakan masyarakat dalam APBD kota Bandar lampung setiap tahun nya selalu meningkat sekalipun alokasinya terbilang kecil di banding sector lainya, secara nominal total belanja daerah mengalami kenaikan, Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan dinegaranya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Lampung persentase penduduk pra sejahtera di daerah perkotaan pada bulan September 2017 sebesar 9,13 persen naik menjadi 9,27 persen pada bulan maret 2018 kenaikan tersebut banyak berbagai komoditas menjadi penyebab adanya perubahan rata- rata pengeluaran penduduk persoalan prasejahtera bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk kurang mampu. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan prasejahtera. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk kurang mampu, kebijakan penanggulan prasejahtera juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang yang tidak mampu, meskipun demikian gerakan yang di arahkan untuk penanganan kesejahteraan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan dana BOS untuk anak sekolah, bantuan Raskin untuk masyarakat prasejahtera dan lain-lain bahwa diperlukan suatu penanganan secara cermat lagi tentang penyebab pra sejahtera terutama di kota Bandar Lampung sehingga berbagai strategi yang di gunakan dalam mengurangi angka kemiskinan akan lebih efektif dan efisien.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan dalam pandangan fiqh siyasah ?
2. Bagaimana penanganan kemiskinan dalam pandangan UU di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui program kerja pemerintah terhadap penanganan kemiskinan
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang program kerja pemerintah kota dalam penanganan kemiskinan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, diharapkan akan memberikan pahaman bagi pemerintah kota Bandar Lampung mengenai penanganan yang menyebabkan kemiskinan disuatu wilayah dan

solusinya. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan program kerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun pemerintah kota Bandar Lampung yang secara khusus menangani masalah kemiskinan

F. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian⁹ Penelitian ini termasuk jenis kualitatif yang menampilkan data penelitian dengan kata-kata.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian lapangan, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data yang sudah ada, yang dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu system pemikiran, ataupun suatu peristiwa dalam masa sekarang, Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana

⁹ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

pandangan fiqih siyasah terhadap program kerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan.¹⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari pihak Bappeda kota Bandar Lampung dan juga masyarakat kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini ada teknik dalam pengumpulan data yaitu Populasi dan Sampel. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Bappeda Kota Bandar Lampung dan juga masyarakat kota Bandar Lampung, populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek yang menjadi sasaran. Sedangkan Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari urutan populasi yang diperoleh melalui proses sampling tertentu.¹¹

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive*. Sampling adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

¹⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 22 (Bandung: Raja Resdakarya, 2004) h. 174

¹¹ Sedamayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002). H 72

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan *setting* kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹²

b. Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹³ dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak Bapedda kota Bandar lampung

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.¹⁴ Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan di teliti

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 58

¹³ *Ibid*, h. 59.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metodologi penelitian dalam teori dan praktek* (Jakarta: PT. Rineke cipta, 2004), h.106.

berapa besar populasi tersebut, sehingga jika sesuatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, Adapun Populasi atau sumber data dalam penelitian ini adalah Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPEDDA) 45 orang, maka untuk keseluruhan populasi tersebut adalah 45 orang, Kepala badan bapedda pemerintah kota Dr.Khaidarmansyah, S.H.,M.Pd. Bagian Program dan informasi Oktaviani, S.T,M,Si. Eliza, S.P. Randy Rivani, S.E, M.M. Nico Yanuar Pratama, S.Sos. Bidang Sosial Yenni Leontina, S.STP.,M.M. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Yanti Nurani, S.E. Nur Diyana, S.Sos. Iwan Suseno, S.E., M.M. Bidang Pembangunan Manusia Drs. Ahmad Sarladi, M.A. Dicky Ramdahni, SH, MH. Kokriyati, SE. Bidang Ekonomi Ratu Kemalasari, S.Sos.. Heri Wahyudi, S.Sos. Teddy Kurniawan, A. Md. Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi Siti Dwi Oktaviani, S.T., M.T. Rachmawati, S.H., M.H. Hairul Saleh bren. Bidang Ketertiban Umum dan Administrasi Kependudukan Komsiyah, S.Sos., M.M. Sugandi Za, S.Kom., M.M. Ekasari Musa, S.Kom. Intji Zulkarnain, S.H. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Diona Martinalova, S.Pi., M.M. Dedi Kesuma Jaya, S.E., M.M. Innana Farhaniu Adri, S.H., M.H. Widya Ariani Bidang Kesehatan Yenni Susiana.

b. Sampel

Dalam hal ini menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sampling, yaitu “pengambilan sample yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”.¹⁵ Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat,relavan, dan kompeten dengan masalah dipecahkan. Dari jumlah populasi yang ada yakni 45 orang, penulis akan mengidentifikasi

15 Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

keseluruh populasi yang sesuai dengan kriteria tertentu yang dapat mewakili jumlah populasi yang ada, setelah itu penulis akan menjadikannya sampel pada penulis meneliti 4 orang diantaranya yaitu Ibu Yenni Leontina sebagai anggota bidang sosial, Bapak Dr. Khaidarmansyah sebagai anggota badan Bapedda, Ibu Nur Diyana sebagai pemberdayaan masyarakat, Ibu Leni Susiana sebagai bidang kesehatan, Saiful Ambi, Kusnadi, Jumino, Jamaludin, Maryanti, Elina, Rita Sebagai masyarakat kurang mampu

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

- a. Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.¹⁶
- b. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu program kerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan, yang dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa data lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program kerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanganan kemiskinan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Fiqih Siyasah yaitu agar memberikan kontribusi keilmuan

16 Susiadi, M.Sos.I, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

serta memberikan pemahaman tentang mengenai program kerja pemerintah kota Bandar lampung dalam penanganan kemiskinan.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan system program kerja pemerintah kota Bandar lampung dalam penanganan kemiskinan. Ditinjau dari pandangan Fiqih siyasah. Analisis yang dituangkan dalam bab-bab keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqih Siyasah

1. Pengertian siyasah merupakan tarkib *idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci¹⁷.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi Siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, Siyasah adalah sebagai berikut: "Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya." Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan Siyasah sebagai berikut: "Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah "mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus

¹⁷ Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008). hlm. 31

dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.¹⁸.

2. Prinsip-prinsip Fiqih siyasah

a. Prinsip menegakkan keadilan

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relavan dengan topic ini yaitu, dalam surat an-Nisa ayat 135',¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (النساء: ١٣٥)

Artinya : Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya

¹⁸Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia, 2014. hlm. 3

¹⁹Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini.*, Jakarta: Kencana, 2004). hlm.117

*allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*²⁰ (Q.S. An-Nisa/4:135)

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakkan keadilan yaitu:

- a) Kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman.
- b) Setiap mukmin menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan kejujuran dan seadil-adilnya.

Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti bahwa dilarang untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi terkecuali boleh dalam hal kebenaran.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan.

b. Prinsip musyawarah

Dalam Al-Qur'an musyawarah terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (العمران : ١٥٩)

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007) hlm.131.

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²¹(Q.S. Al-Imran/4: 159

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang berpegang dalam rumus “setengan plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.²² Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah adapun prinsip-prinsip bermuyawarah dalam islam antara lain:

- a) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta kehidupan bernegara.
- b) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang di landasi iman karena Allah
- c) Dalam musyawarah yang terpenting bukan siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
- d) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hlm. 90.

²²Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*h. 112.

- e) Dalam islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara)
- f) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam islam lazim disebut sebagai *ijma*.

Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara islam.²³ Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'rufnahi mungkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sebagai prinsip, maka al-qur'an dan sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan mementukan.²⁴ Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan dimesjid karena pada hakekatnya masjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun mu'amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khilafah yang menggantikan Rosullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usma, dan ali.

²³Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,2005). hlm.36.

²⁴Muhammad Tahir Azhar.*Op.Cit.* h.114.

c. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujarat ayat 13.²⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(الهِجَرَات : ١٣)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁶

(Q.S. Al-Hujarat: 13)

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita adam dan hawa dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.²⁷

²⁵ Ibid., h.124.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 juz*, (Solo: Qomaria Prima Publisher, 2007), hlm 726.

²⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.125

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau realitis²⁸ Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini dalam islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik.

Prinsip persamaan dalam islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan dan mutlak dan sama.

c. Prinsip ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam surah an-Nisa ayat 59.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

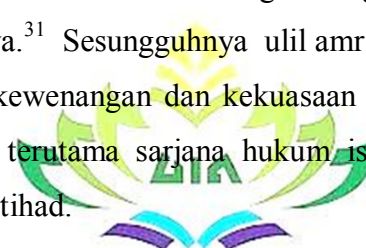
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء: ٥٩)

²⁸Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.88.

²⁹Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.153

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁰(Q.S. An-Nisa/4:59

Ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw dan menaati Ulil Amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.³¹ Sesungguhnya ulil amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan saja, tetapi juga para sarjanh muslim- terutama sarjana hukum islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad.



d. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.³² Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan surah At-Taubah ayat 103;

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hlm. 273

³¹Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*h.153.

³²*Ibid*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة: ١٠٣)

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui.³³ (Q.S. At-Taubah: 103)

3. Bidang-Bidang Fiqih Siyasah

a. Siyasah Syar'iyah

Setiap ilmu pastinya mempunyai obyek dan bidang bahasanya, begitu pula dengan siyasah syar'iyah. Fiqih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqih-fiqih siyasah menghususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segal ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Fiqih siyasah memiliki persamaan dengan fiqih pada umumnya dengan siyasah syari'iah yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqih berbeda dengan fiqih siyasah pada umumnya terdapat pada umumnya terdapat pada kajian. Kajian fiqih sangatlah luar dan umum, termasuk di dalamnya mengkaji tentang fiqih siyasah. Sementara kajian fiqih siyasah sangatlah terbatas yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.³⁴

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek fiqih siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hlm.273

³⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Madah, Yoyakarta, hlm 28

dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, obyek-obyek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan “pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari’ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah amah yang tetap.”³⁵

b. Siyasah Maliyah

Siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.³⁶

Secara garis besar fiqh siyasah maliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahanya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal fungsinya.³⁷

c. Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: Pertama dalil-dalil yang berisikan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadist, *maqashid al-shari’ah*, dan semangat

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar’iyat, Dar al-Anshar, Al-Qohirat, 1997, hlm*

³⁶ Muhammad Syaltout, *Al-Islam ‘Aqiedah Wa al-Syariah*, Darul Qalam, 1996 hlm 258

³⁷ *Ibid.* h.258

ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.³⁸

Apabila dipahami penggunaan kata *dustursama* dengan *constitution* dalam bahasa inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dhusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah fiqh *dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itu tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia.³⁹

Sumber-sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah saw di dalam menerapkan hukum di negeri arab.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hlm.53

³⁹ *Ibid.* hlm 53 et seq.

Siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat.

Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* tercapai.

B. Tugas pemerintahan dalam fiqih siyasah

Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun ke agamaan dan untuk memelihara agama.

Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam ibn taimiyah untuk melaksanakan syariat islam demi terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat, paradigma pemikiran ini banyak disandarkan kepada ayat ayat alquran dan hadist⁴⁰

⁴⁰Ibn Taimiyah, *Al-Siyasat.*, h. 9-29.

Menurut Hasan al-Banna sebagai dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas pemerintahan Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang. Kedua, menyelenggarakan pendidikan. Ketiga, memelihara kesehatan. Keempat, memelihara kepentingan umum. Kelima mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda dan keenam yaitu mengokohkan akhlak⁴¹.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambing kesatuan umat Islam kelangsungan sejarah umat Islam.⁴²

Ada dua contoh yang menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lain, ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat, namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya.⁴³

Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara yang dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.⁴⁴

Kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya, telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para

⁴¹Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik, Op.Cit.*, h. 40.

⁴²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Op.Cit.*, h.260-261.

⁴³Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukum fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.), h. 134.

⁴⁴Abdul Qadir 'Audah, *Al-Islam wa Audha una al-Siyasah*, (Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978), h. 215.

ulama *Fiqih Siyasa* mengenai hak dan kewajiban kepala negara di antaranya yang terkenal adalah al-Mawardi, dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara, yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
4. Menegakkan *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insane terpelihara.
5. Memperkuat pertahanan-keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan negara seperti *ghanimah*, *al-fai'*, pajak, dan sedekah lainnya.
8. Menentukan belanja negara (APBN)
9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.⁴⁵

Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas-tugas kepala negara hanya dalam empat bidang saja, yaitu:

⁴⁵Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 15-16

1. Mengembangkan dakwah islam dan menegakkan kebenaran.
2. Menegakkan keadilan.
3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid'ah.
4. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara tegas oleh *nashsh*.⁴⁶

Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serang-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.⁴⁷

Kewajiban kepala negara di atas dapat pula dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi masyarakatnya. Dalam hal ini rakyat berhak memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas. Menurut Audah, hak-hak asasi manusia yang wajib dipelihara kepala negara yang ditetapkan oleh islam jauh sebelum barat mendengungkannya adalah hak persamaan dan kemerdekaan.

Dalam hak kemerdekaan Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ras, bangsa, warna kulit, dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama, perbedaan di sisi Tuhan hanya karena takwanya di samping itu Nabi juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non-arab antara kulit putih dan berwarna, mereka semua sama laksana sisir.

⁴⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Al-khilafah aw al-Imamah al-Uzhmah*, (Kairo: Mathaba'ah al-Manar, 1341), h. 27-29

⁴⁷Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chichago: University of Chicago Press, 1988), h. 70.

C. Peningkatan kemakmuran dalam sejarah Islam

1. Masa Nabi dan Sahabatnya

Kapasitas nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam bentuk literature. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern.

Beliau mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin ketertiban eksteren, menjamin kebebasan bagi semua golongan mengorganisir militer dan memimpin peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima keputusan-keputusan dari berbagai suku arab dan jazirah arab, mengirim surat-surat dan delegasi kepada para penguasa di jazirah arab, mengelola zakat dan pajak serta larangan riba di bidang ekonomi untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, menjadi *hakam*(arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di madinah bila beliau bertugas keluar, melaksanakan musyawarah dan sebagainya.

Di dalam ilmu politik dan tatanegara juga disebutkan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah melaksanakan penertiban dan mencegah bentrok-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan⁴⁸.

Dalam sumber lain menyudutkan bahwa tugas-tugas kepala negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan keamanan dan ketertiban umum agar terhindar dari gangguan serangan dari

⁴⁸Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*,h .46

luar maupun dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan⁴⁹.

a. Masa Abu Bakar al-Shidiq

Sementara dalam masalah ekonomi hal penting yang dilakukan Abu Bakar adalah mengembalikan suku-suku arab kepada kewajiban membayar zakat, Abu Bakar memandang bahwa zakat di samping sebagai kewajiban agama juga merupakan sarana efektif dalam rangka pemerataan pendapatan. Orang yang ingkar membayar zakat merupakan “Pemberontak” yang mengganggu stabilitas ekonomi karenanya sebelum gerakan mereka menimbulkan goncangan yang lebih hebat bagi stabilitas politik abu bakar segera memerangi mereka.

Selain zakat, infak, dan sedekah, perekonomian negara juga ditunjang dari hasil rampasan perang dan pajak dari *ahl al-dzimmi*. Inilah yang dikelola abu ‘ubaidah sebagai bendaharawan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya disini pula negara membayar gaji “pegawai negeri”, tentara dan orang-orang yang berhak menerima bantuan negara menurut agama.⁵⁰

Dapat dikatakan pemerintah Abu Bakar merupakan “batu ujian” pertama bagi umat islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran islam setelah Nabi SAW wafat. Abu Bakar dapat melaksanakan ujian tersebut dan berhasil membangun sebuah system pemerintahan yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warganya memang kalau diperhatikan system pemerintahan periode Abu Bakar masih belum memisahkan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.

Semua kekuasaan pada akhirnya bermuara juga kepada Abu Bakar. Di samping itu ada beberapa sahabat yang menduduki

⁴⁹G.S. Diponolo, *ilmu negara*, Jilid I, (Jakarta, Balai Pustaka :1975), h. 55

⁵⁰ Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia, 2014 hlm. 60

dua jabatan sekaligus namun adanya asa persamaan antara seluruh rakyat dan control dari segenap anggota masyarakat kekuasaan Abu Bakar sangat egaliter dan demokratis pidato pelantikan Abu Bakar sebagaimana dikutip sebelumnya di atas menunjukkan betapa Abu Bakar menerapkan pola pemerintahan yang benar-benar modern di tengah-tengah situasi masyarakat dunia yang masih menganut system kerajaan absolute dan mengesampingkan hak-hak rakyatnya.

Robert N Bellah sebagaimana dilukiskan Nurcholish Madjid menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakar khususnya dan masyarakat Islam klasik umumnya merupakan masyarakat yang terlalu modern untuk masa dan tempatnya ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang tinggi yang diharapkan dari semua lapisan masyarakatnya ia juga modern dalam keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal dan dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan.⁵¹

b. Masa Umar ibn al-Khaththab

Masa pemerintahan ‘Umar dapat dianggap sebagai masa peningkatan kesejahteraan rakyat perluasan daerah membawa dampak banyaknya devisa negara masuk, baik dari rampasan perang maupun pajak yang dibayarkan oleh daerah-daerah yang telah ditundukkan.

Karenanya Umar berusaha memanfaatkan keuangan negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar member tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam

⁵¹ Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm.114

serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam, Rician tunjangan tersebut adalah:

1. Keluarga Nabi:

- a. Abbas ibn Abd al-Muthalib 25.000 dirham,⁵²
- b. Aisyah 12.000 dirham;
- c. Istri-istri Nabi lainnya 10.000 dirham;
- d. Shafiyah 6.000 dirham;
- e. Juwairiyah 6.000 dirham;

2. Veteran Perang Badar

- a. Umar ibn al-Khaththab 5.000 dirham;
- b. Ali ibn Abi Thalib 5.000 dirham;
- c. Usman ibn Affan 5.000 dirham;
- d. Hasan ibn Ali 5.000 dirham;
- e. Husein ibn Ali 5.000 dirham;

3. Anshar

- a. Abu Dzar al-Ghiffari 4.000 dirham;
- b. Muhammad ibn Maslamah 5.000 dirham;

4. Tokoh-Tokoh Badar Hingga Perjanjian Hudaibiyah 4.000 dirham;

5. Orang yang hijrah ke Habsyi 4.000 dirham;

6. Orang yang hijrah sebelum *fath Mekkah* 3.000 dirham;

7. Orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah hingga penumpasan gerkan murtad 3.000 dirham;

8. Orang yang hidup pada masa *fath Mekkah* hingga perang Qadisiyah 2.000 dirham;

9. Orang hidup pada perang Qadisiyah hingga Yarmuk 1.000 dirham;

10. Panglima perang 7.000 s.d 8.000 dirham;

11. Abdullah ibn Umar 3.000 dirham;

⁵² Terdapat berbagai versi tentang tunjangan untuk Abbas ini. Abu Yusuf menyebutnya 12.000 dirham, al-Mawardi, 7.000 dirham. Ada juga sumber lain yang menyebutkan 5.000 dirham.

12. Usamah ibn Zaid 4.000 dirham;
13. Penduduk Yaman, Syam dan Irak 1.000 s.d 2.000 dirham;
14. Istri-istri kaum Muhajirin dan anshar 600 dirham;
15. Penduduk Mekkah 800 dirham;
16. Ibu yang menyusui 200 dirham;
17. Bayi yang baru dilahirkan 100 dirham.⁵³

Selain yang tercatat di atas Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap anak punggut atau terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari *Bait al-Mal* dan disimpan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin besar pula.

Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu oertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar system yang telah digariskan Umar.⁵⁴

2. Masa Umayyah

Dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pemerintahan Bani Umayyah juga mencatat perkembangan yang sangat pesat. Pada masa pemerintahan Abduk Malik ibn Marwan (65-86 H/684-705M), Alat tukar mata uang bizantium dan Persia yang berlaku sebelumnya diganti dengan mata uang yang dicetak sendiri dan memakai bahasa arab.

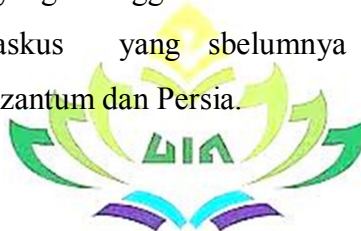
⁵³ Empat orang lain Umar ini dikelompokkan ke dalam veteran Perang Badar.

⁵⁴ Thaha Husein, *al-Syaikhani*, hlm. 186-187.

Pada masa penggantinya, al-Walid ibn Abdul Malik (86-96H/705-714M), Daulat umaiyah mengalami puncak kemakmuran ia member jaminan hidup untuk anak yatim dan orang cacat dan menyediakan pendidikan buat mereka⁵⁵.

Hal penting yang menunjang pendapatan negara pada masa Bani Umayyah antara lain adalah Zakat dari umat Islam, rampasan perang, pajak atas tanah dari warga non-muslim, pajak perdagangan dan pajak kepala negara non-muslim. Sumber keuangan ini dimanfaatkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pendapatan inilah Mu'awiyah membangun armada angkutan lautnya yang tangguh dan membangun pelabuhan perdagangan Damaskus yang sbelumnya sudah mati akibat peperangan antara Bizantium dan Persia.



3. Abbasiyah

Dalam perekonomian, sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Pada masa Harun al-Rasyid pemasukan negara dari sector ini mencapai 272 juta dirham dan 4,5 juta dinar. Sementara pada masa al-Mu'tashim, pajak yang berhasil terkumpul meningkat sebesar 314.271.350 dirham dan 5.502.000 dinar⁵⁶.

Penghasilan dari pajak tersebut, selain untuk kepentingan masyarakat luas dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai tiap-tiap departemen. Selain pajak sumber devisa negara lainnya adalah pertanian, perdagangan dan industri⁵⁷.

Untuk menunjang sektor sektor-sektor ini khalifah awal Bani Abbas membangun jembatan, irigasi dan memanfaatkan pupuk. Penyuluhan-penyuluhan juga intensif dilakukan untuk peningkatan

⁵⁵ Al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, hlm. 223. W.

⁵⁶ Muhammad Khudary Beik, *Muhadharah tarikh al-Umam al-Islamiyah al-Da'wah al-Abba-siyah*, (Kairo: Mathaba'ah al-istiqomah, 1945). h. 242-243

⁵⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, h.303

hasil pertanian. Disamping itu pemerintah mendirikan sekolah-sekolah pertanian. Peningkatan ini turt mendorong peningkatan pajak untuk negara, namun demikian juga berhati-hati dalam menetapkan pajak, Disaat hasil pertanian menurun, pemerintah pun menurunkan besarnya pajak.⁵⁸

4. Zaman Modern

- a. **Iran.** Negara ini berbentuk republic dengan nama resmi Republik Islam Iran yang disahkan pada tanggal 24 april 1979. Sedangkan kosntitusinya di sahkan pada tanggal 2 dan 3 desember 1979. Agama resmi adalah Islam menurut paham syiah tapi aliran-aliran Islam lain dihormati, demikian pula penganut Kristen, yahudi, dan Zoroaster secara resmi diakui akan hak dan keberadaanya sebagai kelompok-kelompok penganut agama minoritas.

Semua warga negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Persia, arab, buluchistan, kurdi, turki dan lain-lain memiliki hak-hak yang sama dengan kehidupan sosial politik. Urusan politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsep spiritual dan etik Islam, sedangkan system hukum di negara ini sedang menjalani proses memberlakukan hukum Islam bagi semua aspek.⁵⁹

- b. **Pakistan.** Negara ini dibentuk pada tanggal 15 agustus 1947. Kepala negara dijabat oleh presiden dan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Kekuasaan legislative dipegang oleh dewan perwakilan rakyat dan kekuasaan legislative oleh mahkamah agung.

Konstitusi negara ini tahun 1956 kemudian diadakan perubahan dan penyusuaian tahun 1962, tahun 1964 dan tahun

⁵⁸Grunebaum, *Classical Islam*, h.102; Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, h.84

⁵⁹Michael Adams (ed.), *Op. Cit.*, Artikel "Iran"

1973 menyatakan bahwa nama resmi negara ini adalah “Republik Islam Pakistan”, dan tidak akan diundangkannya suatu undang-undang yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah nabi. Konstitusi juga memerintahkan agar dibentuk dua lembaga, pertama, lembaga penelitian Islam yang berhubungan dengan penelitian terutama tentang Islam di dunia modern. Kedua dewan penasehat ideology Islam yang bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang cara-cara mendorong umat Islam supaya dapat mengikuti pola menurut ajaran Islam, dan memeberikan nasehat kepada pemerintah tentang apakah suatu rancangan undang-undang bertentangan dengan Islam.

Di dalam pasal-pasal konstitusi disebutkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, hak persamaan di depan hukum, keadilan sosial, kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, hak-hak ekonomi dan sosial politik dilindungi oleh undang-undang.⁶⁰

- c. **Indonesia.** Negara ini dimerdekakan pada tanggal 17 agustus 1945 dari tangan kaum colonial oleh seluruh rakyat melalui perjuangan kekuatan senjata, gerakan politik dan diplomatic serta kekuatan iman, negara kesatuan ini mengambil bentuk pemerintahan republic, kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh presiden yang dipilih lima tahun sekali oleh majelis permusyawaratan rakyat (MPR).

Dalam pembukaan UUD1945 disebutkan, republic Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atas dasar ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan

⁶⁰Munawir Sjadzali, *op.cit.*,h. 228, dan John L. Esposito, *Islam and development*. Terjemah A. Rahman Zainuddin, (Jakarta : Bulan Bintang, , 1986), h. 218-228

dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disebut Pancasila.

Amanat pembukaan UUD 1945 ini menghendaki agar rakyat dan pemerintah Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disyukuri dengan mengaktualisasikan hak-hak kepada Tuhan yaitu iman dan takwa kepadanya serta beramal saleh, dan menghormati hak-hak kemanusiaan terhadap sesama sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial.

Sebab esensi syukur atau mengisi kemerdekaan adalah memelihara dan mengembangkan apa yang sudah diperoleh, yaitu memelihara dan mengembangkan hak menjalankan ajaran agama, hak penghormatan atas martabat dan harkat kemanusiaan, hak memperoleh keadilan, hak berbicara dan menyatakan pendapat, dan hak bekerjasama menuju ke persatuan.

Beberapa prinsip penting ketetapan UUD 1945 yang menjadi dasar-dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, keadilan, perdamaian dan pertahanan.

D. Pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam

Kata “miskin” di dalam Al-Qur’an biasa digandengkan dengan kata “*faqir*”, karena itulah dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur di dalam Al-Qur’an. Para ulama berpendapat dalam mengungkapkan definisi miskin dan faqir ini Wahbah al-Zuhaili ketika menafsirkan ayat keenam puluh dari surat al-Taubah membedakan antara makna miskin dan faqir ini.

Menurutnya “*al-fuqara*” menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefakiran hidupnya. Sementara “*al-*

masakin”menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta dan usaha tetapi tidak dapat mencukupi keperluannya, seolah-olah ialah adalah orang yang lemah hidupnya.⁶¹

Al-Qur'an dan Hadist tidak menetapkan angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan, termasuk yang manakah di antara keduanya, baik itu faqir atau miskin yang lebih layak dibantu. Akan tetapi Quraish Shihab menggolongkan ke dua golongan ini sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu.⁶²

Kesimpulan ini di pertegas lagi dengan adanya pendapat bahwa pada prinsipnya orang miskin dan orang faqir miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebalikan dari orang kaya, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta seukuran satu nissab dari kebutuhan pokoknya dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan bidang sandang, pangan, papan, minuman, kendaraan, sarana untuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki semua itu dapat dikategorikan sebagai orang faqir yang berhak memperoleh zakat.⁶³

Konsep zakat mempunyai relevansi dengan system kerakyatan yang menguntungkan umat Islam dan dapat memberdayakan perekonomiannya sebagai suatu peningkatan kesadaran dan pengalaman tentang zakat bagi masyarakat muslim dan pemerintah Indonesia, munculah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945, adalah dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat dari kemakmuran perorangan atau kelompok tertentu,

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah* juz. 2 (Beirut: Dar al-fikr, 1404H/1984M), h. 259

⁶²*Ibid*, h. 263

⁶³Abuddin Nata, dkk, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kontruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa Raya, 2008), h. 154-155

sebab jika kemakmuran perorangan yang justru di utamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan individu dan elite tertentu yang memiliki kekuasaan, kekuatan, dan jika kondisi ini benar-benar terjadi maka rakyatlah yang menanggung kesengsaraan dan penindasan di bidang ekonomi.

Keberadaan zakat dalam system hukum Indonesia ditentukan dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Salah satu tujuan zakat adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia secara memakmurkan kehidupan masyarakat dengan sistem ekonomi yang bernilai keadilan. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Nilai ekonomi yang dianut dalam negara Indonesia adalah system ekonomi kerakyatan, dimana ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) seperti yang tercantum secara eksplisit dalam pasal 33 UUD 1945.⁶⁴ Selain itu zakat merupakan doktrin ibadah *mahdhah* bersifat wajib, mengandung doktrin sosial ekonomi Islam yang merupakan antitesa terhadap system ekonomi riba.⁶⁵

Seperti diakui oleh para cendekiawan Muslim, baik bersekala nasional, Internasional, bahwa selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.⁶⁶

Islam memang tidak menjadikan banyaknya harta sebagai tolak ukur kekayaan hakiki, karena yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan kepuasannya, sebuah lingkaran betapan kecilnya adalah sama

⁶⁴Mubiwito, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 23.

⁶⁵Zaki 'Ulya, Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk penegakkan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, (*Jurnal Al-'Adalah 'Ulya* Vol.XII,No. 3, Juni 2015). h. 56

⁶⁶Ismail Hasan Metareum, et.al., *Perubahan Demi Keadilan Untuk Kepentingan Rakyat*, (Jakarta: Media Sentosa), h. 103.

dengan 360 derajat, tetapi betapa besarnya bila tidak bulat maka ia pasti kurang angka tersebut karena itu islam mengajarkan apa yang dinamai *qana'ah*, namun itu bukan berarti *nrimo* (menerima apa adanya).

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh sebagaimana yang dijelaskan oleh Qureish Shihab yang secara garis besar dapat dirinci pada tiga hal pokok, yaitu kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain (masyarakat), dan kewajiban pemerintah. Pertama kewajiban terhadap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh Al-Qur'an karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pertama dan utama yang diajarkan Al-Qur'an untuk mengentaskan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu, Banyak ayat yang memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja segala pekerjaan yang halal dipujinya sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya.

E. Pengentasan kemiskinan Dalam Undang-Undang Di Indonesia.

1. Undang-undang Di Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 mengamatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermatabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan

pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan⁶⁷.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara⁶⁸.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam konsideran undang-undang disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur. Untuk dapat memberikan jaminan sosial yang menyeluruh negara mengembangkan system jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan mampu mensinkronisasikan penyelenggara berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepersertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta⁶⁹

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Wilayah kota Bandar Lampung pada zaman colonial hindia belanda termasuk wilayah *Onder Afdeling* teluk betung yang dibentuk berdasarkan *staatsbalat* 1912 Nomor : 462 yang terdiri dari ibu kota teluk betung sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, ibu kota teluk betung ini meliputi juga Tanjung karang yang terletak sekitar 5km disebelah utara kota teluk betung.

Ibu kota *Onder Afdeling* teluk betug adalah tanjung karang, sementara kota telukbetung sendiri berkedudukan sebagai ibukota Keresidenan lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Damang yang tunduk ~~kepada~~ *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* selaku kepala *Onder Afdeling* telokbetong⁷⁰.

Pada zaman pendudukan jepang, Kota Tanjungkarang-Teluk betung disajikan *Si* (kota) dibawah pimpinan seorang *Sicho* (bangsa jepang) dan dibantu oleh seorang *Fuku Sichu* (bangsa Indonesia).

Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kota Tanjungkarang dan kota Telukbetung menjadi bagian dari kabupaten lampung selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari kabupaten lampung selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan

⁷⁰ Wikipedia, Kota Bandar Lampung, (On-Line), Tersedia di : [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Bandar Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung). Pada tanggal 26 April 2019.

statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1965), kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi kota madya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung⁷¹.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-indonesia yang kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jendral Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 juni 1982 antara lain berisikan: *“lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”* dan hasil symposium Hari jadi Kota Tanjungkarang-Telukebtung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1983 tanggal 26 febuari 1983 ditetapkan bahwa hari jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 juni 1682.

⁷¹*Ibid*

2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan 19,722Ha(197,22 Km²), dengan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan luas perairan 39,82 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berikut adalah data yang menunjukkan luas wilayah Kota Bandar Lampung:

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedaton	457
2	Sukarame	1.475
3	Tanjung Karang Barat	1.064
4	Panjang	1.415
5	Tanjung Karang Timur	269
6	Tanjung Karang Pusat	405
7	Telukbetung Selatan	402
8	Telukbetung Barat	1.102
9	Telukbetung Utara	425
10	Rajabasa	636
11	Tanjung Seneng	1.780
12	Sukabumi	2.821
13	Kemiling	2.505
14	Labuhan Ratu	864
15	Way Halim	535
16	Langkapura	736
17	Enggal	349
18	Kedamaian	875
19	Telukbetung Timur	1.142
20	Bumi Waras	465
Jumlah		19.722

Sumber: Perda Nomor 12 tahun 2012⁷²

⁷² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung

Secara kondisi kota Bandar lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kabupaten yang ada di provinsi Lampung, antara lain:

- a. Kecamatan Natar (Kabupaten lampung selatan) di sebelah Utara.
- b. Kecamatan Padang Cermin (Kecamatan Pesawaran) dan katibung (Kecamatan Lampung Selatan) serta Teluk Lampung di sebelah selatan.
- c. Kecamatan Gedong tatan dan Kecamatan Padang cermin (Kabupaten Pesawaran) di sebelah barat.
- d. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah timur. Secara geografis kota Bandar lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur.

Kota Bandar lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribuan logistic dari jawa menuju Sumatra maupun sebaliknya serta memiliki pelabuhan panjang untuk kegiatan ekspor impor dan pelabuhan srenge yang melayani distribusi batu bara dari sumtra ke jawa sehingga secara langsung kota Bandar lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi.⁷³

Kota Bandar lampung berpotensi untuk menjadi kota metropolitan seiring dengan program pada tahun 2015, kota Bandar lampung dan kota metro merupakan wilayah kawasan yang dipetakan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai area metropolitan, terkhusus dalam cetak biru wilayah pengembangan strategis merak-bakauhuni Bandarlampung-Palembang-tanjung api-api. Keunggulan kota metropolitan ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa, industry, pariwisata serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut

⁷³Perubahan RPJMD kota Bandar lampung Tahun 2016-2021

kota Bandar lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di provinsi Lampung.⁷⁴

Pembangunan jalur tol akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan pulau Sumatra, pulau jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol laut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effecter* masuk ke kota Bandar lampung. Kota Bandar lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antar pulau.

3. Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung

a. Jumlah Penduduk

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin 2012-2016:

Tabel 2.5 Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2012	456.620	446.265	902.885	102
2013	475.039	467.000	942.039	102
2014	484.215	476.480	960.695	102
2015	493.411	485.876	979.287	102
2016	502.418	495.310	997.728	101

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 adalah sebanyak 997.728 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 502.418 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 495.310 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 101, yang berarti bahwa penduduk perempuan. Pada tahun 2015, penduduk kota Bandar Lampung berjumlah

⁷⁴*Ibid*, h.3

979.287 jiwa dengan *sex ratio* 102. Pada tahun 2014, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 960.695 jiwa dengan *sex ratio* 102. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahun di kota Bandar Lampung.

b. Kepadatan Penduduk.

Berikut adalah data kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Telukbetung Barat	30.365	11,02	2.755
2	Telukbetung Timur	42.439	14,83	2.862
3	Telukbetung Selatan	40.103	3.79	10.581
4	Bumi Waras	57.823	3.75	15.419
5	Panjang	75.716	15.75	4.807
6	Tanjung Karang Timur	37.815	2.03	18.628
7	Kedamaian	53.593	8.21	6.528
8	Telukbetung Utara	51.556	4.33	11.907
9	Tanjung Karang Pusat	52.098	4.05	12.864
10	Enggal	28.620	3.49	8.201
11	Tanjung Karang Barat	55.750	14.99	3.719
12	Kemiling	66.885	24.24	2.759
13	Langkapura	34.587	6.12	5.651
14	Kedaton	49.990	4.79	10.436
15	Rajabasa	48.941	13.53	3.617
16	Tanjung Senang	46.647	10.63	4.388
17	Labuhan Ratu	45.696	7.97	5.734
18	Sukarame	58.005	14.75	3.933
19	Sukabumi	58.436	23.6	2.476

20	Way Halim	62.663	5.35	11.713
----	-----------	--------	------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017⁷⁵

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administrative Kota Bandar Lampung. Hal tersebut sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik dari antar wilayah di dalam kota Bandar Lampung maupun luar kota Bandar Lampung yang masuk ke kota Bandar Lampung.

B. Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting untuk menentukan masa depan seseorang maka peran program pemerintah kota dalam pendidikan yaitu melaksanakan system pendidikan yang sesuai standar serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudian menindak lanjuti dengan program-program peningkatan kualitas Pendidikan⁷⁶.

Program pemerintah kota dalam pendidikan:

- a. Sekolah gratis melalui program bina lingkungan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- b. Kuliah gratis bagi anak program bina lingkungan yang berprestasi di Universitas Lampung, UIN Raden Intan dan ITERA.
- c. Bantuan perlengkapan sekolah dalam bentuk baju seragam, tas, sepatu dan alat tulis

⁷⁵ Laporan Badan Pusat Statistik

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu. Yenni Leontina, S.STP., M.M sebagai anggota bidang sosial yang ada di Bapedda kota Bandar Lampung.

- d. Perluasan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- e. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan.
- f. Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan dunia usaha dan industry.
- g. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga pendidik.
- h. Bantuan uang oprasional bagi guru honorer
- i. Pemberdayaan lembaga pendidik (formal dan non formal) dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM, termasuk penguasaan iptek dan peningkatan imtaq secara terarah,terpadu, dan berkelanjutan.
- j. Peningkatan akuntabilitas, traparansi, serta efesiensi dan efektivitas penyelenggara pendidik melalui peningkatan mutu manajemen pendidikan sesuai standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan⁷⁷.

2. Pekerjaan

Pekerjaan sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan seseorang semakin tinggi derajat seseorang maka akan semakin tinggi juga penghasilanya. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang baik.Hal ini menyebabkan pendapatan mempengaruhi kesejahteraan seseorang⁷⁸.

Program pemerintah kota dalam pekerjaan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan.

⁷⁷Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KPD) Kota Bandar Lampung;

⁷⁸Wawancara dengan Bpk. Dr. Khaidarmansyah, S.H., M.Pd sebagai kepala badan Bapedda Kota Bandar Lampung.

- b. Penajaman program lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada kelurahan-kelurahan dan kantong-kantong komunitas miskin
- c. Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat, dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya.
- d. Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada.
- e. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal.
- f. Mengembangkan potensi wilayah dan klaster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptakan lapangan pekerjaan⁷⁹.

3. Perumahan

Pemerintah kota Bandar Lampung telah menyiapkan Rp 17,5 miliar untuk membedah rumah warga yang kurang mampu yang mendapatkan bantuan melalui program bedah rumah yang dananya berasal dari APBD, program bedah rumah ini

⁷⁹Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2018

sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di kota Bandar lampung⁸⁰

Program pemerintah kota dalam rumah:

- a. Perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman.
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
- c. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme relokasi permukiman ketempat yang layak dan aman

4. Kesehatan

Urusan kesehatan berkaitan dengan peran pemerintah kota Bandar lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam urusan kesehatan pemerintah kota telah melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat seperti Jamkeskot (jaminan kesehatan kota) dan menyediakan fasilitas ambulance gratis bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pendukung atas peran dan prasarana kesehatan⁸¹.

Program pemerintah kota dalam kesehatan:

- a. Berobat gratis di 12 rumah sakit pemerintah dan swasta serta puskesmas rawat inap dengan lama perawatan 5 hari di kelas III, puskesmas pembantu dan poskeskel
- b. Melahirkan gratis hanya dengan membawa E-KTP, KK
- c. Program ambulance gratis bagi pasien darurat melalui call center 082278221400

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Diyana sebagai bidang pemberdayaan masyarakat

⁸¹ Wawancara dengan Ibu. Leni Susiana sebagai bidang kesehatan Kota Bandar lampung

- d. Bantuan oprasional bagi kader posyandu.
- e. Perluasan kesempatan melauai kebijakan yang diarahkan pada peningkatan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya palayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk relokasi anggaran kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan pelayan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- f. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembang pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin, seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, serta
- h. Upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kerja sama global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin⁸².

Hasil penelitian dari masyarakat miskin di teluk betung tentang terealisasinya program kerja pemerintah kota Bandar lampung dalam penanganan kemiskinan :⁸³

A. Pendidikan, sekolah gratis bagi siswa/siswi miskin dan bantuan perlengkapan sekolah seperti baju sekolah, tas, sepatu dari program bina lingkungan pemerintah kota yang sudah terlaksana, hanya saja pembagian tersebut belum menyeluruh, hanya di tingkat SD sampai SMP saja. Kenyataan yang ada dari masyarakat miskin yang masih sekolah berharap kepada

⁸²Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KPD) Kota Bndar Lampung Tahun 2018

⁸³Wawancara dari masyarakat miskin di teluk betong kecamatan jln teluk bone

pemerintah kota agar pembagian penanganan kemiskinan itu merata soal pendidikan.

B. Pekerjaan, kebijakan pemerintah belum sampai kepada masyarakat setempat untuk berperdayakan orang-orang seperti kami (miskin), harapan dari masyarakat setempat untuk pemerintah kota agar memperluas lapangan pekerjaan yang buat kami terutama masyarakat miskin di Bandar Lampung agar dapat memenuhi kebutuh-kebutuhan sehari-hari apalagi dijamin sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

C. Perumahan, mengenai program bedah rumah, itu sudah ada dan sudah terlaksana oleh pemerintah kota. Namun itu hanya beberapa rumah saja yang terpilih oleh pemerintah. harapan kami agar pemerintah memberikan program tersebut dengan menyeluruh dan adil tidak tebang pilih

D. Kesehatan, mengenai program kesehatan dari pemerintah kota itu sudah terlaksana. Karena kami warga sekitar sudah mendapatkan KIS atau BPJS jadi untuk berobat pun kami gratis dan untuk melahirkan juga gratis cukup hanya membawa KTP dan KK, untuk ambulan gratis pun itu juga sudah terlaksana kami hanya member uang sukarela sebagai ucapan terima kasih kami.

BAB IV

ANALISIS

A. Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan pada dasarnya terlebih dahulu diperhatikan dalam Fiqih Siyasah yang dapat dilihat dalam tindakan, tindakan tersebut secara langsung mendeklarasikan bahwa negara menjamin bagi setiap individu taraf hidup layak. Dalam fiqih siyasah menetapkan prinsip-prinsip jaminan sosial secara jelas yang diaplikasikan dalam bentuk jaminan individu, keluarga dan masyarakat.

Pemerintah dalam fiqih siyasah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik asset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa.

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara lainnya.

Dalam hal ini belanja negara ditujukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang wajar dalam penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi kritis, seperti ekonomi atau bencana alam, pemerintah berkewajiban langsung mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.

Prinsip utama dengan program-program pemerintah kota maupun pemerintah pusat pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri, tercapainya kesejahteraan

masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam, Ini diawali dengan cukupnya materi satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain.

Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur karena itu pemerintah harus mengarahkan investasi bidang modal fisik pada pembangunan ekonomi untuk kepentingan sosial lebih besar.

Pengadaan sarana sosial seperti sarana kesehatan, panti jompo, lapangan pekerjaan, pendidikan, merupakan kegiatan mutlak pemerintahan negara Islam pemerintah harus menyediakan alokasi dana belanja untuk kegiatan-kegiatan tersebut dalam lapangan kesehatan umpamanya pemerintah mesti mempersiapkan lingkungan yang sehat lengkap dengan fasilitas rumah sakit dan obat-obatan yang dibutuhkan dan terjangkau oleh masyarakat ambulan gratis bagi masyarakat miskin layanan kesehatan bagi masyarakat harus benar-benar maksimal dan menyentuh segenap lapisan masyarakat.

Pemerintah juga harus dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang cara hidup sehat sehingga mereka betul-betul memperhatikan pola hidup mereka rakyat dapat menuntut pemerintah untuk memenuhi fasilitas gizi, penyediaan air bersih, perumahan yang sehat, aman, dan nyaman serta pembersihan lingkungan kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari beberapa besar belanja negara untuk peningkatan sektor ini semangat pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pernyataan Nabi bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim.

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah melahirkan pribadi-pribadi muslim yang dapat menyusikan diri dengan cita-cita yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada lingkungan yang Islami, mengajarkan keterampilan yang selalu baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah, kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan, pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.

Rencana atau solusi dalam pemerintah untuk menangani kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program-program penanganan kemiskinan program tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha.

Pemerintah telah berupaya keras untuk menangani kemiskinan dan mengurangi pengangguran hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat melalui pendampingan usaha dan bantuan upaya tersebut juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk program penanganan kemiskinan.

A. Penanganan Kemiskinan Dalam Pandangan UU DI Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang cara pelaksanaan penanganan kemiskinan sebagai implementasi dalam pasal penting tentang kesejahteraan sosial yaitu peraturan pemerintah sampai peraturan presiden pelaksanaanya melalui program-program yang di

koordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan atau sering disebut sebagai TNP2K ditingkat pusat dan TKPKD ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Dalam peraturan presiden dapat diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan di tingkat pusat yang keanggotaanya terdiri dari pemerintah, masyarakat dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk tim koordinasi penanganan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota

Dalam peraturan presiden tentang penanganan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota bertugas melakukan koordinasi penanganan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program-program penanganan kemiskinan koordinasi kemiskinan adalah sarana untuk penegakan hukum itu sendiri semakin terkoordinasi penanganan kemiskinan antar sektor maka semakin efektif dan tepat sasaran.

Efektif dan ketepatan sasaran adalah target dari penegakkan hukum dalam penanganan kemiskinan semakin efektif dan tepat sasaran maka penanganan kemiskinan makin sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penanganan kemiskinan tidaklah hanya dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangat diperlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri baik secara kelompok maupun secara perseorangan.

Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penegak hukum yang adil, jujur dan memegang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya dan warga dunia.

Dan yang pasti orang-orang yang termasuk dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orang-orang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk ke dalam golongan tersebut.

2. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.

Jika kemiskinan ini semakin merajalela maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama.

B. Saran

1. Saran ditujukan pada pemerintah

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global ini di perlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, eksploratif, selain itu globalisasi membuka mata bagi pegawai pemerintah, maupun calon pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia (tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya), dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia lebih eksploratif di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

2. Saran ditujukan pada masyarakat

Perlunya penguatan kelompok swadaya masyarakat (ksm) peminjam demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan masyarakat Kota Bandar Lampung melalui program-program pemerintah kota yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997.

Lincoln Arsyat, *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002.

A. dijazuli, *fiqih siyasah*, Preneda Media, Jakarta. 2000.

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Renika Cipta, 2003.

Sri Edi Suwarsono. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* Jakarta, , Cendikiawan Tentang Islam UI Press, 2007.

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Mahkota, Edisi Revisi, 1996.

Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

Lois Gootschalk, *Understanding, History, A Primer Of Historical Method*, Terjemah Nugroho Noto Susanto, UI Press, 1985.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Joko Subagyo, *Metodologi penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2004.

Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Susiadi, M. Sos. I, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Ibnu Syarif, Mujaer dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz* (solo: Qomari Prima Publisher, 2007).

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini.*, Jakarta: Kencana, 2004.

Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 juz*, Solo: Qomaria Prima Publisher, 2007.

Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukum fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.

Abdul Qadir 'Audah, *Al-Islam wa Audha una al-Siyasah*, Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978.

S. Diponolo, *ilmu negara*, Jilid I, Jakarta, Balai Pustaka :1975.

Muhammad Khudary Beik, *Muhammad dan tarikh al-Umam al-Islamiyah al-Da'wah al-Abba-siyah*, Kairo: Mathaba'ah al-istiqomah, 1945

Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, Chichago: University of Chicago Press, 1988

Mubiwito, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997

Zaki 'Ulya , *Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk penegakkan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, *Jurnal Al-'Adalah* 'Ulya Vol.XII, No. 3, Juni 2015

Ismail Hasan Metareum, et.al., *Perubahan Demi Keadilan Untuk Kepentingan Rakyat*, Jakarta: Media Sentosa.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KPD) Kota Bandar Lampung.

Wawancara dengan Ibu. Yenni Leontina, S.STP., M.M sebagai anggota bidang sosial yang ada di Bapedda kota Bandar lampung.

Wawancara dengan Bpk. Dr. Khaidarmansyah, S.H., M.Pd sebagai kepala badan Bapedda Kota Bandar Lampung.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

Wawancara dengan Ibu. Nur Diyana, S.Sos sebagai anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Bapedda Kota Bandar Lampung.

Wawancara dengan Ibu. Leni Susiana sebagai sub kesehatan Kota Bandar lampung.

Wawancara dengan Bapak Kusnadi sebagai masyarakat

Wawancara dengan Bapak Jumino sebagai masyarakat

Wawancara dengan Bapak Jamaludi sebagai masyarakat

Wawancara dengan Ibu Maryanti sebagai masyarakat

Wawancara dengan Ibu Elina sebagai masyarakat

Wawancara dengan Ibu Rita sebagai masyarakat

